

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan konsep-konsep yang menjadi landasan utama baik untuk melakukan analisa penelitian maupun untuk memperluas mengenai wawasan ilmu kesejahteraan sosial, pekerjaan sosial dan kontribusi pedagang wanita sektor informal dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar keluarga di Pasar Baru Trade Center Kota Bandung.

2.1. Tinjauan Tentang Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial dianggap sebagai ilmu dan disiplin. Kesejahteraan sosial adalah studi tentang institusi, rencana, personel dan kebijakan yang didedikasikan untuk memberikan layanan sosial kepada individu, kelompok dan komunitas. Kesejahteraan sosial berupaya untuk mengembangkan pengetahuan agar dapat mengidentifikasi masalah sosial, penyebabnya serta strategi untuk menanggulangnya.

2.1.1. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan konsep yang memiliki arti yang luas. Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai kondisi untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan hidup, terutama kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan.

Konsep kesejahteraan sosial juga menunjukkan semua kegiatan penyelenggaraan dan penyaluran pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, terutama kelompok yang rentan. Menurut Friedlander dalam Fahrudin (2014: 9) konsep kesejahteraan sosial yaitu:

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari usaha-usaha sosial dan lembaga-lembaga yang ditujukan untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan, serta untuk mencapai relasi perseorangan dan sosial dengan relasi-relasi pribadi dan sosial yang dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka secara penuh, serta untuk mempertinggi kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Definisi di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu bidang kegiatan yang bertujuan untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai pemenuhan kebutuhan hidupnya serta meningkatkan kemampuan keberfungsian mereka dalam menjalankan perannya masing-masing.

Sebagai organisasi yang memberikan pelayanan bantuan, lembaga kesejahteraan sosial dapat memenuhi taraf hidup, kesehatan keluarga dan masyarakat, serta memenuhi kebutuhan sosial individu dan kelompok. Definisi kesejahteraan sosial menurut Suharto (2010: 3) adalah sebagai berikut:

Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kesejahteraan yang melibatkan aktifitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu.

Definisi tersebut menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah salah satu lembaga sosial yang kegiatan atau pranata sosialnya berperan penting dalam mencegah, menanggulangi atau membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh individu, kelompok dan masyarakat. Kesejahteraan sosial bertujuan untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritual masyarakat, jika semua kebutuhan tersebut terpenuhi maka akan mendorong masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan mencapai fungsi sosial. Dalam hal ini, pemerintah, lembaga

dan masyarakat itu sendiri bertanggung jawab untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

2.1.2. Tujuan Kesejahteraan Sosial

Tujuan kesejahteraan sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dengan mengurangi stres dan guncangan, sehingga memulihkan fungsi setiap orang, kelompok dan masyarakat dalam kehidupan. Tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial tercermin dalam semua rencana kesejahteraan sosial sampai batas tertentu.

Menurut Adi Fahrudin (2014: 10) kesejahteraan sosial mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, dalam arti tercapainya standar kehidupan dalam memenuhi kebutuhan dasar pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan mengeksplorasi sumber-sumber, meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang makmur dan memuaskan.

Menurut kutipan di atas, tujuan kesejahteraan sosial difokuskan pada terwujudnya pola dasar kehidupan manusia yang meliputi kebutuhan fisik, sosial dan ekonomi serta penyesuaian dalam meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Dalam Undang - Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan dari penyelenggara kesejahteraan sosial sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup.
2. Memperbaiki fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.

3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggara kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggara kesejahteraan.

Penjelasan di atas menyebutkan maksud dari pernyataan poin pertama adalah bahwa kesejahteraan sosial diselenggarakan agar dapat meningkatkan kehidupan individu, keluarga dan masyarakat ke arah yang lebih baik. Poin kedua menjelaskan bahwa dalam mencapai kemandirian masyarakat, diperlukan keberfungsian sosial dari masyarakat itu sendiri yang mana mereka berperan sebagaimana perannya masing-masing. Poin ketiga adalah suatu ketahanan sosial merupakan upaya dalam mencegah, menangani serta menanggulangi masalah yang terjadi di masyarakat. Penjelasan poin keempat adalah usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab masyarakat. Dan poin yang terakhir adalah tujuan dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu meningkatkan kualitas manajemen pada penyelenggara kesejahteraan tersebut.

2.1.3. Fungsi - Fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi utama kesejahteraan sosial adalah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat untuk mencapai kehidupan yang layak. Fungsi kesejahteraan sosial lainnya yaitu meningkatkan pembangunan sosial, perlindungan sosial, membangun masyarakat dan memberdayakan masyarakat sebagai upaya kesejahteraan sosial dalam skala pembangunan sosial.

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial menurut Friedlander dan Apte (1982) dalam Fahrudin (2012: 12) adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Pencegahan (*Preventive*)
Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat diri individu, keluarga dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru.
2. Fungsi penyembuhan (*Curative*)
Kesejahteraan sosial ditujukan untuk mengurangi kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional dan sosial agar individu yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat.
3. Fungsi Pengembangan (*Development*)
Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan sistem dan sumber-sumber daya sosial di dalam masyarakat.
4. Fungsi Penunjang (*Supportive*)
Fungsi ini melingkupi kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial.

Menurut kutipan di atas, fungsi kesejahteraan sosial meliputi pencegahan, penyembuhan, pengembangan dan penunjang kehidupan masyarakat. Fungsi tersebut dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan, keadaan dan kondisi masyarakat itu sendiri.

2.1.4. Bidang - Bidang Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial memiliki cakupan dan bidang yang luas. Dalam arti sempit dijelaskan menurut Fink (1974), Friedlander (1980), Mendoza (1981) dan Zastrow (1996) (dalam Isbandi, 2005: 128), bidang-bidang kesejahteraan sosial antara lain meliputi:

1. Bidang yang terkait dengan Sistem Penyampaian Layanan (*Service Delivery System*)
2. Bidang yang terkait dengan Layanan Sosial terhadap Keluarga
3. Bidang yang terkait dengan Pelayanan terhadap Anak-anak dan Generasi Muda

4. Bidang yang terkait dengan Kesejahteraan Sosial untuk Lanjut Usia (Lansia)
5. Bidang yang terkait dengan Kelompok Khusus
6. Bidang yang terkait dengan Jaminan Sosial (Bantuan Sosial dan Asuransi Sosial)
7. Bidang yang terkait dengan Pengentasan Kemiskinan
8. Bidang yang terkait dengan Perumahan dan Lingkungan Sosial
9. Bidang yang terkait dengan Layanan Kesehatan Masyarakat
10. Bidang yang terkait dengan Perawatan Medik
11. Bidang yang terkait dengan Layanan Kesehatan Jiwa
12. Bidang yang terkait dengan Lembaga Koreksional
13. Bidang yang terkait dengan Lembaga Pendidikan
14. Bidang yang terkait dengan Area Lain

2.2. Tinjauan Tentang Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial adalah profesi pertolongan profesional. Pekerjaan sosial sendiri menitikberatkan pada pemberian pelayanan sosial kepada individu, kelompok dan masyarakat agar dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik.

Menurut *National Association of Social Workers (NASW)* dalam Fahrudin (2014: 60) adalah:

Social work is the professional activity of helping individuals, groups or communities to enhance or restore their capacity for social functioning and to create societal conditions favorable to their goals. Social work practice consist of the professional application of social work values, principles, and techniques to on or more of the following ends: helping people obtain tangible services; providing counselling and psychoteraphy for individuals, families, and groups; helping communities or groups; helping communities or groups provide or improve social and health services; and participating in relevant legislative processes. The practice of social work requires knowledge of human development and behavior; of social, economic and cultural intitutions; and of the interaction of all these factors.

Pekerjaan sosial adalah kegiatan profesional untuk membantu individu, kelompok atau komunitas untuk meningkatkan atau memulihkan kapasitas mereka untuk fungsi sosial dan untuk menciptakan kondisi sosial yang menguntungkan bagi tujuan mereka. Praktik pekerjaan sosial terdiri dari penerapan nilai-nilai, prinsip dan teknik kerja sosial secara profesional pada atau lebih dari. Pekerjaan sosial juga memiliki tujuan sebagai berikut: membantu individu mendapatkan layanan nyata; memberikan konseling

dan psikoterapi untuk individu, keluarga dan kelompok; membantu masyarakat atau kelompok; membantu masyarakat atau kelompok memberikan atau meningkatkan layanan sosial dan kesehatan; dan berpartisipasi dalam proses legislatif yang relevan. Praktek pekerjaan sosial membutuhkan pengetahuan wawasan tentang perkembangan dan perilaku manusia; dari intitusi sosial, ekonomi dan budaya dan interaksi semua faktor ini.

Sehubungan dengan kutipan di atas, pekerjaan sosial tidak terlepas dari penerapan nilai, prinsip dan tujuannya. Pekerjaan sosial sendiri berfokus pada proses membantu individu, kelompok dan komunitas. Proses pertolongan ini ditujukan untuk individu, kelompok atau komunitas yang menderita disfungsi sosial atau fungsi sosial yang kurang baik.

2.2.1. Fokus Pekerjaan Sosial

Sebagai proses pertolongan, pekerjaan sosial memiliki banyak peran sejak awal proses dan peran tersebut akan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dalam proses pelaksanaannya. Peran pekerja sosial adalah sebagai fasilitator, mediator, mentor, perencana, pemecah masalah dan evaluator. Peran tersebut menjadi pedoman bagi pekerja sosial untuk meningkatkan fungsi sosialnya dan kinerjanya dapat dilihat dari beberapa strategi pekerjaan sosial.

Menurut Dubois dan Miley yang dikutip oleh Suharto (2007: 5), fokus pekerjaan sosial adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapabilitas individu dalam menghadapi masalah yang dialaminya.
2. Mengonfrontasikan individu dengan sistem dan jaringan sosial yang memungkinkan mereka menjangkau dan memperoleh berbagai sumber, pelayanan dan kesempatan.
3. Meningkatkan kinerja lembaga-lembaga sosial sehingga mampu memberikan pelayanan sosial secara efektif, berkualitas dan berkeperimanusiaan.

4. Merumuskan dan mengembangkan perangkat hukum dan peraturan yang mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi tercapainya pemerataan ekonomi dan keadilan sosial.

Pekerja sosial dalam menjalankan tugasnya bersama klien, mereka tidak hanya fokus pada tujuan perubahan, tetapi juga fokus pada lingkungan sosial klien dan bagaimana orang-orang di sekitarnya memiliki pengaruh yang besar terhadap situasi klien. Ruang pekerja sosial bertujuan untuk menggunakan nilai-nilai, pengetahuan dan keterampilan profesional pekerja sosial untuk membantu individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang membutuhkan layanan sosial. Fokus utama pekerjaan sosial adalah meningkatkan fungsi sosial melalui serangkaian proses dengan tujuan dan strategi.

2.2.2. Fungsi Pekerjaan Sosial

Menurut Siporin dalam Sukoco (1992: 52-54) membagi fungsi dasar pekerjaan sosial menjadi empat bagian sebagai berikut:

1. Mengembangkan, memelihara dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia.
2. Menjamin memadainya standar-standar subsistensi kesehatan dan kesejahteraan bagi semua orang.
3. Meningkatkan kemampuan orang untuk melaksanakan fungsinya secara optimal sesuai dengan status dan peranan mereka di dalam insutusi-institusi sosial.
4. Mendorong dan meningkatkan ketertiban sosial (*social order*) serta struktur institusional masyarakat.

Berdasarkan kutipan di atas terlihat bahwa fungsi pekerjaan sosial terkonsentrasi pada kebutuhan dasar, standar kesehatan dan kesejahteraan, status dan peran dalam institusi sosial serta tatanan sosial struktur kelembagaan yang ada dalam rangka mewujudkan fungsi sosial dalam tatanan sosial.

2.2.3. Prinsip - Prinsip Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial sebagai proses yang tentunya profesional, dalam ketentuannya memiliki prinsip-prinsip yang menaungi dan mengiringi dalam kelangsungannya. Menurut Mans dalam Fahrudin (2014: 16-19), terdapat enam prinsip dasar dalam praktek pekerjaan sosial yaitu sebagai berikut:

1. **Penerimaan**
Prinsip ini mengimbau seorang pekerja sosial yang menerima klien tanpa "menghakimi" klien tersebut. Pekerja sosial yang menerima klien dengan sewajarnya (apa adanya) akan lebih membantu pengembangan relasi antara pekerja sosial dengan kliennya. Dengan adanya sikap menerima (menerima keadaan klien apa adanya) ini, maka klien akan dapat lebih percaya diri dan dengan demikian ia (klien) dapat mengutarakan berbagai macam perasaan, kesulitan dan masalah yang mengganjal di dalam pembicaraan.
2. **Komunikasi**
Prinsip komunikasi ini dengan mudah dapat mendukung. Untuk berkomunikasi dengan klien, baik dalam bentuk komunikasi yang verbal, yang meminta klien melalui sistem klien, maupun bentuk komunikasi non-verbal, seperti cara membuka pembicaraan dengan klien, memilih cara duduk, duduk dalam suatu pertemuan dengan anggota keluarga yang lain.
3. **Individualisasi**
Prinsip individualisasi pada intinya merefleksikan setiap individu yang berbeda satu sama lain, sehingga seorang pekerja sosial harus dapat mengatur cara memberi dan memperlakukan setiap kliennya, guna mendapatkan hasil yang diinginkan.
4. **Partisipasi**
Berdasarkan prinsip ini, seorang pekerja sosial harus mensyaratkan kliennya untuk berpartisipasi aktif dalam upaya memecahkan masalah yang dihadapinya, sehingga klien dapat menggunakan sistem klien yang juga menyediakan rasa bantuan untuk bantuan tersebut. Karena tanpa ada kerja sama dan peran serta klien maka upaya bantuan sulit untuk mendapatkan hasil yang optimal.
5. **Kerahasiaan**
Prinsip kerahasiaan ini akan memungkinkan klien atau sistem klien mengungkapkan apa yang sedang ia rasakan dan bahaya yang ia hadapi dengan rasa aman, karena ia yakin apa yang diutarakan dalam hubungan kerja dengan pekerja sosial akan tetap dijaga (dirahasiakan) oleh pekerja sosial agar tidak diketahui oleh orang lain (mereka yang tidak berkepentingan).

6. Kesadaran diri pekerja sosial

Prinsip kesadaran diri ini menekan pekerja sosial untuk menjalin relasi profesional dengan menjalin relasi dengan kliennya, dalam arti pekerja sosial yang mampu menggerakkan benar-benar terhanyut oleh perasaan atau bantuan yang disampaikan oleh kliennya tidak "kaku" dalam percakapan dengan pekerja sosial, yang pesan informasi atau cara bicara, cara berbicara dan lain-lain, bantuan dengan setiap tanggung jawab terhadap keberhasilan proses.

2.2.4. Tahapan - Tahapan Intervensi Pekerjaan Sosial

Intervensi yang dilakukan oleh pekerja sosial akan melalui beberapa tahapan. Dalam pelaksanaannya tahapan-tahapan ini disebut dengan tahapan intervensi pekerjaan sosial. Siporin dalam Iskandar (2013: 65) menyatakan terdapat enam tahapan intervensi pekerjaan sosial yaitu sebagai berikut:

1. Tahap *Engagement, Intake & Contract*

Tahap ini adalah tahap permulaan pekerja sosial bertemu dengan klien. Dalam proses ini terjadi pertukaran informasi mengenai apa yang dibutuhkan klien, pelayanan apa yang akan diberikan oleh pekerja sosial dan lembaga sosial dalam membantu memenuhi kebutuhan klien atau memecahkan masalah klien. Kontrak diartikan sebagai suatu kesepakatan antara pekerja sosial dengan klien yang di dalamnya dirumuskan hakekat permasalahan klien, tujuan-tujuan pertolongan yang hendak dicapai, peranan-peranan dan harapan-harapan pekerja sosial dan klien, metode-metode pertolongan yang akan digunakan serta pengaturan-pengaturan lainnya.

2. Tahap *Assessment*

Assessment merupakan proses pengungkapan dan pemahaman masalah klien, yang meliputi: bentuk masalah, ciri-ciri masalah, ruang lingkup masalah, faktor-faktor penyebab masalah, akibat dan pengaruh masalah, upaya pemecahan masalah yang terdahulu yang pernah dilakukan klien, kondisi keberfungsian klien saat ini dan berdasarkan hal itu semua maka dapat ditentukan fokus atau akar masalah klien.

3. Tahap Membuat Perencanaan Intervensi

Rencana intervensi merupakan proses rasional yang disusun dan dirumuskan oleh pekerja sosial yang meliputi kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan untuk memecahkan masalah klien, apa tujuan pemecahan masalah tersebut.

4. Tahap Melaksanakan Program Berdasarkan Rencana Intervensi
Pekerja sosial mulai melaksanakan program kegiatan pemecahan masalah klien. Dalam pemecahan masalah ini hendaknya pekerja sosial melibatkan klien secara aktif pada setiap kegiatan.
5. Tahap Evaluasi
Pada tahap ini pekerja sosial harus mengevaluasi kembali semua kegiatan pertolongan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilannya, kegagalannya atau hambatan yang terjadi. Ada dua aspek yang harus dievaluasi oleh pekerja sosial yaitu tujuan hasil dan tujuan proses.
6. Tahap Terminasi
Tahap terminasi dilakukan bilamana tujuan pertolongan telah tercapai atau bilamana terjadi kegiatan referral atau bilamana karena alasan-alasan yang rasional klien meminta pengakhiran pertolongan atau karena adanya faktor-faktor eksternal yang dihadapi pekerja sosial atau karena klien lebih baik dialihkan ke lembaga-lembaga atau tenaga ahli lainnya yang lebih berkompeten. Pembagian kerja yang jelas akan mempermudah pelaksanaan pelayanan sosial sampai pada tujuan yang diharapkan.

Penjelasan dari enam tahapan intervensi pekerjaan sosial di atas merupakan suatu tahapan-tahapan yang harus dipahami oleh seluruh pekerja sosial. Tahapan-tahapan ini bisa diterapkan kepada individu, kelompok dan masyarakat dalam upaya mengembalikan keberfungsian sosialnya.

2.2.5. Peran - Peran Pekerja Sosial

Peran pekerja sosial dalam menangani masalah mencakup masalah tiga level yakni, level mikro (individu), mezzo (keluarga dan kelompok kecil) dan makro (organisasi atau masyarakat). Pada masing-masing level peran pekerja sosial memiliki metode-metode yang berbeda-beda dalam penanganannya. Di level mikro dikenal sebagai *casework* (terapi perseorangan atau terapi klinis), di level mezzo ada beberapa metode *groupwork* (terapi kelompok) dan *family therapy* (terapi keluarga) dan pada level makro menggunakan metode *community*

organization and community development (pengembangan masyarakat) atau *policy analysis* (analisis kebijakan).

Menurut Bradford W. Sheafor dan Charles R. Horejsi, sebagaimana dikutip oleh Suharto (2014: 155) peran yang dilakukan pekerja sosial dalam suatu masyarakat atau badan atau lembaga atau panti sosial akan beragam tergantung pada permasalahan yang dihadapinya. Peranan yang dilakukan oleh pekerja sosial antara lain:

1. Peranan Sebagai Perantara (*Broker Roles*)
Pekerja sosial memperhadapkan antara klien dengan sistem sumber baik bantuan berupa materi ataupun non materi yang terdapat di suatu badan atau lembaga atau panti sosial baik panti asuhan, panti rehabilitasi dan lain-lain. Sebagai perantara pekerja sosial juga harus berupaya untuk mencari suatu jaringan kerja dengan suatu organisasi atau perusahaan yang dapat membantu pelayanan yang dibutuhkan.
2. Peranan Sebagai Pemungkin (*Enabler Role*)
Peranan ini merupakan peran pekerja sosial yang sering digunakan dalam profesinya karena peran ini menggunakan konsep pemberdayaan dan difokuskan pada kesanggupan, keahlian, kapasitas dan kompetensi klien untuk menolong dirinya sendiri. Pada peranan ini pekerja sosial berperan sebagai konselor berusaha untuk memberikan peluang agar kebutuhan dan kepentingan klien dapat terpenuhi dan terjamin, mengidentifikasi tujuan, memfasilitasi untuk berkomunikasi, serta memberikan peluang untuk pemecahan masalah yang dihadapi klien. Klien melakukan semaksimal mungkin kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya agar dapat bermanfaat dan dapat mengatasi permasalahannya.
3. Peranan Sebagai Penghubung (*Mediator Role*)
Peran pekerja sosial sebagai penghubung (*mediator role*) adalah bertindak untuk mencari kesepakatan, sebagai penengah dalam perbedaan, konflik antarklien dengan keluarga, konflik antarklien yang satu dengan yang lain, untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan dan memperoleh hak-hak yang semestinya.
4. Peranan Sebagai Advokasi (*Advocator Role*)
Peran yang dilakukan oleh pekerja sosial di sini berbeda dengan advokat hukum. Advokat hukum dituntun melalui keinginan hukum sesuai dengan hukum pada suatu negara, sedangkan untuk advokat pekerja sosial dibatasi oleh kepentingan yang bersumber dari klien atau penerima pelayanan.

5. Peranan Sebagai Perunding (*Conferee Role*)
Peranan yang diasumsikan ketika pekerja sosial dan klien atau penerima layanan mulai bekerja sama. Peran pekerja sosial ini dilakukan ketika pencarian data dan pemberian gambaran pada korban.
6. Peranan Sebagai Pelindung (*Guardian Role*)
Peran pekerja sosial sebagai pelindung (*guardian role*) sering kali dilakukan oleh bidang aparat, akan tetapi pekerja sosial dapat berperan melindungi klien atau penerima pelayanan, juga orang-orang yang rentan terhadap kehidupan sosialnya.
7. Peranan Sebagai Fasilitasi (*Fasilitator Role*)
Seorang fasilitator pekerja sosial harus memberikan pelayanan yang bervariasi dalam memberikan pelayanannya tergantung pada kebutuhan serta masalah yang dihadapi klien, hal ini bertujuan agar klien tidak merasa tertekan dan jenuh dengan pelayanan yang diberikan apabila pelayanan tersebut bervariasi dan menarik. Di samping itu, peran ini sangat penting untuk membantu meningkatkan keberfungsian klien khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai yaitu dalam pemecahan masalah yang dihadapi klien.
8. Peranan Sebagai Inisiator (*Inisiator Role*)
Peranan yang memberikan perhatian pada masalah atau hal-hal yang berpotensi untuk menjadi masalah.
9. Peranan Sebagai Negosiator (*Negotiator Role*)
Peran ini dilakukan terhadap klien yang mengalami konflik atau permasalahan dan mencari penyelesaiannya dengan kompromi dengan persetujuan dan kesepakatan bersama antarkedua belah pihak. Posisi seorang negosiator berbeda dengan mediator yang posisinya netral. Seorang negosiator berada pada salah satu posisi yang sedang memiliki konflik.

2.3. Tinjauan Tentang Usaha Kesejahteraan Sosial

2.3.1. Pengertian Usaha Kesejahteraan Sosial

Pekerjaan kesejahteraan sosial disebut sebagai pelayanan sosial yang diberikan oleh pemerintah, instansi atau lembaga tertentu dengan tujuan untuk memberikan penanggulangan serta pemecahan atas permasalahan sosial namun, dalam pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial tersebut harus diupayakan sesuai dengan sistemnya agar dapat mempertahankan proses dan mengurangi serta mengakhirinya permasalahan tersebut dengan harapan yang baik.

Adapun pengertian dari usaha kesejahteraan sosial menurut Friedlender yang dikutip oleh Fachrudin (2014: 15) yaitu:

Kegiatan-kegiatan usaha sistematis yang terutama dan secara langsung berhubungan dengan pemeliharaan, perlindungan dan penyempurnaan sumber-sumber manusia dan kegiatan ini meliputi usaha-usaha asistensi sosial, asuransi sosial, kesejahteraan anak, pencegahan kriminalitas, kesehatan mental, kesehatan masyarakat, pendidikan rekreasi, perlindungan buruh dan perumahan.

Penjelasan di atas menyebutkan bahwa dalam memberikan upaya kesejahteraan sosial kepada individu, kelompok dan masyarakat atau komunitas yang bertujuan untuk mencegah atau menangani masalah sosial yang ada melalui pelayanan yang diberikan oleh masyarakat, lembaga atau pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan dan pemeliharaan sumber daya manusia, sehingga tercapai keseimbangan dalam keberfungsian dan peran hidup mereka.

2.3.2. Tujuan Usaha Kesejahteraan Sosial

Dalam arti luas, pekerjaan kesejahteraan sosial pada organisasi atau lembaga yang memberikan pelayanan sosial biasanya disebut organisasi pelayanan masyarakat. Dalam hal ini terkait dengan pengabdian masyarakat dalam pekerjaan kesejahteraan sosial. Menurut Scneiderman dalam Isbandi (2012: 87) menyatakan tiga tujuan dari suatu organisasi pelayanan masyarakat menyediakan usaha kesejahteraan sosial:

1. Tujuan Kemanusiaan dan Keadilan

Tujuan ini bersumber dari pandangan ideal demokratis tentang keadilan sosial dan hal ini berasal dari keteguhan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam mengembangkan potensi diri yang mereka miliki, meskipun terkadang potensi tersebut terdapat hambatan fisik, sosial, ekonomi, kejiwaan maupun faktor lainnya. Karena potensi diri membantu kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk mengatasi masalah. Usaha kesejahteraan sosial

menjadikan mereka sebagai kelompok sasaran dalam upaya menjembatani keunikan sumber daya yang mereka miliki.

2. Tujuan yang Terkait dengan Pengendalian Sosial

Tujuan ini meningkat berdasarkan pemahaman bahwa kelompok yang merasa tidak diuntungkan, kekurangan ataupun tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya akan menjadi ancaman bagi kelompok masyarakat yang sudah mapan. Oleh karena itu, kelompok masyarakat yang sudah mapan berupaya mengamankan diri mereka dari sesuatu yang dapat mengancam kehidupan, kepemilikan maupun stabilisasi yang sudah ada.

3. Tujuan yang Terkait dengan Pembangunan Ekonomi

Tujuan pembangunan ekonomi memprioritaskan pada program-program yang direncanakan untuk meningkatkan produksi barang dan jasa, serta berbagai sumber daya yang dapat menunjang serta memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi. Dalam hal ini, maka disebutkan bahwa pembangunan ekonomi ini harus mengarah pada kesejahteraan masyarakat dengan itu maka akan berdampak baik pada kelangsungan kehidupan sesama.

Dari pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan upaya kesejahteraan sosial bagi organisasi kemasyarakatan di masyarakat adalah untuk mewujudkan suatu tindakan upaya kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait untuk mencapai kesejahteraan sosial yang berkeadilan agar masyarakat dapat menjalankan fungsi sosialnya.

2.3.3. Fokus Usaha Kesejahteraan Sosial

Usaha kesejahteraan sosial pada umumnya berbentuk pelayanan sosial yang sebagai kegiatan-kegiatan terorganisasi yang terutama dan secara langsung berhubungan dengan pemeliharaan, pendampingan dan perlindungan terhadap individu, keluarga maupun masyarakat yang mengalami masalah sosial. Merujuk pada definisi *welfare* dari Howard Jones yang dikutip oleh Soeharto (2014: 8), mengatakan bahwa: “Tujuan dari usaha kesejahteraan sosial yang utama dan

pertama adalah untuk memperbaiki kondisi kemiskinan dan manifestasinya”, seperti rendahnya pendapatan atau rumah tidak layak huni.

Penjelasan selanjutnya terkait usaha kesejahteraan sosial menurut Soeharto (2014: 9) mengungkapkan bahwa: “Usaha kesejahteraan sosial memusatkan pada tiga bidang, yaitu: pelayanan sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat”. Dapat dikatakan bahwa usaha kesejahteraan sosial mencakup tiga bidang tersebut. 1) Bidang pertama yaitu pelayanan sosial; membantu menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang dialami oleh individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dengan menggunakan pendekatan praktik pekerjaan sosial. 2) Bidang kedua yaitu perlindungan sosial; suatu ketetapan dan program yang dianggap dapat mengurangi kemiskinan dan kerentanan melalui upaya peningkatan dan perubahan kapasitas penduduk dalam melindungi mereka dari kondisi yang merugikan. 3) Bidang ketiga yaitu pemberdayaan masyarakat; upaya yang dapat dilakukan untuk dapat menumbuhkan kesadaran dan kemampuan masyarakat berperan aktif dalam proses perubahan.

2.4. Tinjauan Tentang Keberfungsian Sosial

Keberfungsian sosial merupakan konsepsi yang penting dan utama dari pekerja sosial. Keberfungsian sosial merupakan hasil interaksi antara individu dan berbagai sistem sosial dalam masyarakat, seperti sistem pendidikan, sistem keagamaan, sistem keluarga, sistem politik, sistem pelayanan sosial dan lain-lain. Dalam hal ini, keberfungsian sosial adalah kondisi di mana seseorang dapat menjalankan peran sosial yaitu dengan melaksanakan tugas-tugas kehidupan sesuai dengan status sosialnya atau kedudukannya.

Peran sosial adalah apa yang dimiliki oleh setiap individu dalam mempertahankan kehidupannya sendiri, sehingga setiap individu tersebut akan berusaha untuk memelihara, memenuhi dan menjaga kebutuhan hidup dengan caranya sendiri dan melaksanakan tugas-tugas kehidupan sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing untuk mencapai kehidupan yang sejahtera.

Keberfungsian sosial menurut pernyataan dari Fahrudin (2012: 63) menyatakan bahwa:

Keberfungsian sosial menunjukkan keseimbangan komunikasi, integrasi, kesesuaian dan adaptasi timbal balik antara individu atau antara kolektif dan lingkungan. Keberfungsian sosial dievaluasi berdasarkan apakah fungsi sosial memenuhi kebutuhan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan komunitasnya, serta apakah fungsi sosial tersebut normal dan layak secara sosial.

Hal ini menunjukkan bahwa perwujudan dari keberfungsian sosial seseorang akan mencapai titik keseimbangan kehidupan dengan terwujudnya segala kebutuhan di dalam hidupnya, baik itu kebutuhan primer, sekunder dan kebutuhan tersier. Selain memenuhi kebutuhan, peran sosial diperlukan agar dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan peran sosialnya di masyarakat. Peran dalam lingkungan sosial dengan kebutuhan yang saling terkait, karena hubungan dengan individu, kelompok, atau masyarakat merupakan syarat yang diperlukan untuk status sosial seseorang dalam hubungan *peer-to-peer*. Adanya hubungan antara orang-orang dalam suatu lingkungan yang saling mempengaruhi tersebut akan membantu memenuhi persyaratan peran sosial dalam masyarakat.

Apabila suatu keluarga, organisasi sosial dan masyarakat dapat menjalankan peran, fungsi dan tugasnya sesuai dengan status sosial, tanggung jawab dan norma sosial, maka dapat dikatakan mereka memiliki fungsi sosial. Tak

lupa bagi seorang wanita yang bergerak di bidang perdagangan. Mereka memegang peranan yang sangat penting dalam masyarakat terlebih dalam suatu keluarga, karena di dalam keluarga tersebut seorang wanita terkadang dapat berperan ganda. Selain berperan sebagai pengurus rumah tangga keluarga, jika diperlukan mereka juga harus mencari nafkah untuk memperbaiki keadaan perekonomian keluarga mereka.

2.5. Tinjauan Tentang Kontribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kontribusi adalah iuran atau sumbangan yang dapat diartikan iuran atau sumbangan dana pada suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya. Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *Contribute*. *Contribution* mengacu pada partisipasi, partisipasi diri atau donasi. Artinya, dalam hal ini sumbangan dapat berupa materi, spiritual atau pun tindakan. Kontribusi seorang individu adalah dengan cara memberikan bantuan untuk kepentingan umum. Kontribusi dalam arti tindakan, yaitu kontribusi atau partisipasi nyata yang dilakukan oleh individu atau organisasi yang kemudian berdampak positif maupun negatif bagi pihak lain.

Dari definisi kontribusi di atas, dapat dipahami bahwa kontribusi adalah partisipasi individu atau organisasi, kemudian memposisikan diri sebagai peran dalam kolaborasi dan menghasilkan dampak nilai dari aspek sosial dan ekonomi. Kontribusi berarti individu berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Hal tersebut dilakukan dengan cara memperbaiki keberfungsian perannya yang nantinya akan menjadi bidang profesional sehingga lebih tepat selaras dengan kemampuan mereka masing-masing. Kontribusi tersebut dapat

diberikan dalam berbagai macam bidang, baik itu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial dan lainnya (Anne Ahira, 2012).

Oppong dan Church, 2013 (dalam Tawas, 2020) mengatakan bahwa kontribusi pekerja wanita yaitu: 1) kontribusi sebagai orang tua (*parental role*); 2) kontribusi sebagai istri (*conjugal role*); 3) kontribusi di dalam rumah tangga (*domestic role*); 4) kontribusi di dalam kekerabatan (*kin role*); 5) kontribusi pribadi (*individual role*); 6) kontribusi di dalam masyarakat (*community role*); dan 7) kontribusi di dalam pekerjaan (*occupational role*). Kontribusi wanita pekerja tersebut sebagian besar berorientasi ke dalam kontribusi keluarga (*domestic role*) dan selebihnya lebih berorientasi pada masyarakat luas (*public role*). Partisipasi wanita dalam pekerjaan di luar rumah, tentunya akan menghasilkan pendapatan berupa uang yang kemudian akan dikontribusikan kepada pendapatan dan kebutuhan rumah tangganya.

2.6. Tinjauan Tentang Sektor Informal

2.6.1. Pengertian Sektor Informal

Sektor informal merupakan usaha ekonomi yang pembentukan dan operasionalnya tidak melalui bentuk-bentuk perizinan atau peraturan tertentu, wujud kegiatan dan fisik serta profesi dari sektor ini beraneka ragam mulai dari usaha transportasi (misalnya tukang ojek, tukang sampah dan lain-lain), usaha jasa (kuli bangunan, pembantu rumah tangga), usaha dagang (pedagang asongan, pedagang kaki lima) dan sebagainya (Ginting, 2004 dalam Lima et al., 2019).

Sektor informal merupakan unit usaha berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa dengan tujuan menciptakan kesempatan

kerja bagi dirinya sendiri. Sektor informal ini sering disebut juga dengan aktivitas informal, kesempatan kerja yang diciptakan (*self employment*), ekonomi di bawah tanah (*underground economy*), *casual work*, *shadow economy* (Subarsono 1998, dalam Haryanto, 2008).

Menurut Safaria, dkk (2003: 6) sektor informal dipandang sebagai kekuatan yang semakin signifikan bagi perekonomian lokal dan global, seperti yang dicantumkan dalam pernyataan visi *Woman In Informal Employment Globalizing and Organizing (WIEGO)* yaitu mayoritas pekerja di dunia kini bekerja di sektor informal dan proporsinya terus berkembang sebagai dampak dari globalisasi: mobilitas kapital, restrukturisasi produksi barang dan jasa dan deregulasi pasar tenaga kerja mendorong semakin banyak pekerja ke sektor informal.

Pekerja sektor informal adalah tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja sektor informal dengan menerima upah dan atau imbalan (Undang - Undang Ketenagakerjaan, 2003). Selain itu, Bambang dan Mukhlis (2006) mengatakan alasan lain yang dapat menyebabkan wanita memilih bekerja di sektor informal adalah tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikan mereka. Salah satu kegiatan sektor informal yang banyak dilakukan adalah usaha dagang (Putu Martini Dewi, 2012).

Pedagang adalah orang dan atau badan yang melakukan aktifitas jual beli barang dan atau jasa di pasar (Pemkot Yogyakarta, 2009). Pada zaman sekarang, seorang wanita harus kreatif, sabar, ulet dan rajin untuk mencapai kesejahteraan keluarga dan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Banyak hal yang telah dilakukan

misalnya sebagai wirausahawan, pedagang, pengusaha, bekerja di perusahaan swasta atau pemerintah, bahkan pekerjaan paruh waktu atau pekerjaan lain yang biasanya dilakukan oleh pria dalam memberikan dukungan keuangan dan kesejahteraan keluarganya.

2.6.2. Ciri - Ciri Sektor Informal

Menurut Simanjuntak (2001: 117, dalam Lima et al., 2019) ciri-ciri sektor informal antara lain meliputi:

1. Kegiatan usaha yang sederhana;
2. Skala usaha relatif kecil;
3. Umumnya tidak punya izin usaha;
4. Lebih mudah untuk bekerja pada sektor ini karena tiga hal di atas;
5. Tingkat penghasilan umumnya rendah;
6. Keterkaitan dengan sektor lain sangat kecil; dan
7. Jenis usahanya sangat beragam antara lain: pedagang kaki lima, tukang warung, tukang cukur, tukang becak, serta usaha-usaha rumah tangga.

Menurut pendapat Damsar (2009: 158-159), konsep sektor informal dicirikan dengan:

1. Mudah memasukinya dalam arti keahlian, modal dan organisasi;
2. Perusahaan milik keluarga;
3. Beroperasi pada skala kecil;
4. Umumnya tenaga kerja dalam memproduksi barang atau jasa dengan menggunakan teknologi sederhana; dan
5. Pasar yang tidak diatur dan berkompetitif.

Selain itu, disepakati pula serangkaian ciri sektor informal di Indonesia, yang meliputi sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha tidak terorganisasi secara baik, karena unit usaha timbul tanpa menggunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia secara formal;
2. Pada umumnya unit usaha tidak memiliki izin usaha;
3. Pola kegiatan usaha tidak teratur dengan baik, dalam arti lokasi maupun jam kerja;

4. Pada umumnya kebijakan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi rendah tidak sampai ke sektor ini;
5. Unit usaha berganti-ganti dari satu sub-sektor ke sub-sektor lain;
6. Teknologi yang digunakan masih tradisional;
7. Modal dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasinya juga kecil;
8. Untuk menjalankan usaha tidak diperlukan pendidikan formal, sebagian besar hanya diperoleh dari pengalaman sambil bekerja;
9. Pada umumnya unit usaha termasuk kelompok *one man enterprise* dan jika terdapat pekerja, biasanya berasal dari keluarga sendiri;
10. Sumber dana modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri, atau dari lembaga keuangan tidak resmi; dan
11. Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh golongan masyarakat kota atau desa berpenghasilan rendah atau menengah.

2.6.3. Dampak Munculnya Sektor Informal

Keberadaan sektor informal saat ini menjadi sangat penting karena beberapa faktor. Sektor informal selain sebagai penyedia lapangan kerja, juga keberadaan dan kemampuan sektor informal ini bertahan di perkotaan tanpa bantuan dari pemerintah adalah karena kebutuhan akan berbagai macam produk dan jasa yang dihasilkan oleh sektor informal ini.

Selain itu, sektor formal pun membutuhkan keberadaan sektor informal karena saling berkaitan dan melengkapi. Peran sektor informal sebagai basis ekonomi kerakyatan di beberapa kawasan kota besar memegang fungsi strategis sebagai *sector resccue* dan penyangga yang menyelamatkan subsistensi sebagian besar penduduk yang hidup di bawah *urban stress* (Wahyudi 2001, dalam Haryanto, 2008).

Sektor informal sangat membantu selain untuk memenuhi kebutuhan kelas menengah ke bawah juga sangat membantu kepentingan masyarakat dan memberikan kesempatan kerja dengan menyerap tenaga kerja secara mandiri atau

menjadi sabuk pengaman bagi pekerja yang memasuki pasar kerja. Secara umum, sektor informal dinilai lebih mampu bertahan dibandingkan sektor usaha lainnya. Hal ini terjadi karena sektor informal relatif lebih mandiri dari pihak lain terutama dalam hal permodalan dan lebih mampu beradaptasi dengan lingkungan usahanya.

Perbedaan peluang memperoleh pendapatan antara sektor formal dan informal terutama didasarkan pada perbedaan antara pendapatan gaji dan pendapatan usahanya sendiri. Salah satu aspek penting dari perbedaan antara sektor formal dan informal adalah bahwa peluang kerja di sektor informal biasanya dipengaruhi oleh jam kerja, dan jam kerja tidak ditetapkan dalam jangka waktu tertentu (misalnya, seminggu). Hal ini disebabkan tidak adanya kontrak kerja jangka panjang, sehingga upah di sektor ini seringkali dihitung setiap hari atau setiap jam. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara tingkat upah (per jam atau harian) dan pendapatan rata-rata (mingguan atau bulanan).

2.7. Tinjauan Tentang Wanita yang Bekerja

2.7.1. Wanita yang Bekerja

Kelompok sosial terkecil dalam masyarakat adalah keluarga. Keluarga yang inti terdiri dari ayah, ibu dan anak. Untuk membangun keluarga yang sejahtera, semua anggota keluarga harus hidup saling menyayangi, membantu, menghormati, menghargai, mempengaruhi dan mendukung. Misalnya, orang tua harus menciptakan kondisi harmonis dalam kehidupan keluarga, menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh anggota keluarga dan berbagi pekerjaan rumah secara tepat, sehingga dapat terjalin suasana kerja sama dan gotong royong antar anggota keluarga. Dalam keluarga. Seseorang yang bertugas sebagai pencari

nafkah utama adalah suami namun, seringkali penghasilan suami tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga mendorong isteri untuk bekerja.

Oleh karena itu, dalam keluarga dengan kondisi ekonomi rendah, peran wanita dalam keluarga tidak hanya sebagai pengasuh keluarga, tetapi juga sebagai sarana mencari nafkah, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian dan kesejahteraan keluarga. Status wanita sebagai makhluk sosial dan eksistensi sosial memiliki arti bahwa wanita mempunyai hak dan dapat menentukan keinginannya sendiri. Sehubungan dengan perubahan tersebut, dalam beberapa kasus, wanita diperbolehkan masuk ke dalam masyarakat. Wanita dapat memahami diri mereka sendiri dengan lebih baik dan menyadari peran mereka. Wanita menyadari bahwa mereka mampu dan dapat membantu kehidupan keluarga mereka (Hazani et al., 2019).

Wanita sudah lama terlibat dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Dalam keluarga yang kurang mampu secara ekonomi, keterlibatan wanita untuk bekerja bukan saja lazim dilakukan, tetapi merupakan suatu keharusan. Di pedesaan, banyak wanita yang bekerja karena penghasilan suami tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga wanita juga harus membantu mencari nafkah. Tak hanya di pedesaan saja, kini banyak wanita di perkotaan juga mereka membantu kondisi perekonomian keluarga dengan cara bekerja dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup dirinya serta keluarganya.

Wanita adalah sumber ekonomi yang sama pentingnya dengan pria, dan wanita memainkan peran yang sangat penting dalam keluarga. Kehadiran wanita dalam keluarga tidak hanya sebagai pelengkap reproduksi saja, tetapi banyak

penelitian yang menunjukkan bahwa wanita pada umumnya memberikan kontribusi yang besar bagi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Menurut Aswiyati (2016), selain memiliki peran dan kontribusi dalam pembangunan, wanita juga berperan menunjang perekonomian keluarga dengan cara bekerja. Wanita menyadari sepenuhnya cara meningkatkan taraf hidup dan kemajuan sehingga kebutuhan spritual dan material dapat terpenuhi. Perubahan budaya, pandangan yang terbuka dan dukungan dari kaum pria terhadap wanita yang bekerja membuat dunia ketenagakerjaan semakin tinggi karena partisipasi dan peran mereka (Armansyah dan Mirna 2018, dalam Hazani et al., 2019).

Lebih lanjut Artini dan Handayani (2009: 10, dalam Muhammad et al., 2017) mengatakan bahwa umumnya wanita termotivasi untuk bekerja adalah untuk membantu menghidupi keluarga dan umumnya bekerja di sektor informal. Hal ini dilakukan agar dapat membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Banyak fakta yang menunjukkan persentase wanita yang berpeluang bekerja di sektor publik, seperti dokter, penjahit, pengusaha, pedagang dan lain-lain. Selanjutnya menurut Ari, dkk, 2000 (dalam Hazani et al., 2019), peran wanita di Indonesia banyak mendapat sorotan dalam sektor publik, terutama sektor industri dan perdagangan.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa wanita yang bekerja memiliki peran penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan. Wanita yang bekerja di sektor publik menjalankan dua peran yaitu perannya sebagai ibu rumah tangga dan wanita yang mencari nafkah.

Di kalangan wanita pekerja, mereka juga tetap menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian dan membersihkan pekerjaan rumah lainnya. Penghasilan yang diperoleh para wanita ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan perawatan kesehatan bagi setiap anggota keluarga.

Keberhasilan suatu keluarga dalam membentuk suatu rumah tangga yang sejahtera tidak terlepas dari peran seorang wanita yang begitu besar secara khusus pada penelitian ini wanita yang bekerja sebagai pedagang di Pasar Baru Trade Center Kota Bandung. Baik dalam membimbing dan mendidik anak, mendampingi suami, membantu pekerjaan suami bahkan sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah (Baroleh, 2018).

Pada penelitian ini, wanita yang bekerja sebagai pedagang tersebut telah menunjukkan bahwa seorang wanita memiliki hak yang sama dengan pria dalam hal profesi (persamaan gender), karena mereka sama-sama dapat melakukan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarga. Pedagang wanita tersebut harus dapat mengatur waktunya dengan baik, karena mereka tidak dapat melepaskan diri dari peran dan tanggungjawabnya sebagai ibu rumah tangga dan menjalankan peran sosial kemasyarakatannya (Tawas, 2020).

2.8. Tinjauan Tentang Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Dalam hidup manusia di dunia diliputi oleh berbagai kebutuhan untuk membuat hidupnya berarti dan menjadikannya sejahtera. Setiap manusia mempunyai kebutuhan hidup, terutama kebutuhan dasar, karena pada dasarnya

manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan sehari-harinya, termasuk kebutuhan moral dan material, baik kebutuhan penting maupun tidak sesuai dengan kemampuan mereka (dalam Wibowo, 2014).

Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan (dalam Drs. Abdul Samad Asaf, 2019). Begitupun dengan keluarga, kebutuhan keluarga merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh keluarga agar keluarga dapat menjalani kehidupan yang baik. Dalam kehidupan manusia, berbagai kebutuhan muncul untuk menunjang keseharian setiap anggota keluarga. Secara umum kebutuhan keluarga dapat dilihat dari kebutuhan dasar atau pokok manusia.

Pada dasarnya untuk membina kesejahteraan hidup, manusia memerlukan lima macam kebutuhan yang biasa disebut kebutuhan mendasar atau kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok tersebut meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan (Putri, 2019).

Manusia yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri memerlukan sumber daya sebagai pemasok kebutuhan hidupnya, baik dalam bentuk material maupun non-material. Sumber daya tersebut dapat berupa *financial capital*, *physical capital*, *natural capital*, *human capital* dan *social capital* (Ellis F dan Freeman H.A., 2005), yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari tatanan hidup manusia yang butuh hidup, butuh makan dan butuh bersosialisasi karena manusia merupakan makhluk sosial (Muhammad et al., 2017). Adanya kontribusi wanita dapat dikatakan sebagai katup pengaman (*savety*

valve) atau penopang bagi rumah tangga yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari (Haryanto, 2008).

2.8.1. Kebutuhan Pangan

Pangan adalah salah satu kebutuhan manusia yang paling dasar. Manusia tidak bisa hidup tanpa adanya pangan. Oleh karena itu, upaya pemenuhan kebutuhan pangan merupakan upaya kemanusiaan yang mendasar (Hariyadi, 2011). Menurut Undang - Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan mengatakan bahwa: Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan.

Tujuan penyelenggaraan pangan menurut Undang - Undang 18 Tahun 2012 Tentang Pangan adalah:

1. Meningkatkan kapabilitas dalam memproduksi pangan secara mandiri;
2. Menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi konsumsi masyarakat;
3. Mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
4. Mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi;
5. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri;
6. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;
7. Meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan, pembudi daya ikan dan pelaku usaha pangan; dan
8. Melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya pangan nasional.

Kebutuhan pangan dapat memberikan asupan gizi bagi tubuh manusia sehingga dapat melakukan satu atau lebih aktivitas secara normal. Kebutuhan

pangan tersebut yaitu makanan dan minuman. Pemenuhan gizi pada makanan tersebut merupakan hal yang penting dan tentunya harus diperhatikan sesuai dengan jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan dan juga aktivitas seseorang. Menonsumsi gizi seimbang sangat dianjurkan agar dapat menjaga kesehatan tubuh, yakni dengan mengonsumsi sumber energi, lauk pauk, sayuran dan buah-buahan serta waktu makan yang sesuai.

Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak, komponen pada pangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Komponen dan Jenis Kebutuhan Hidup Layak pada Pangan Hasil
Peninjauan Tahun 2020

No.	Komponen dan Jenis	Kualitas atau Kriteria	Jumlah Kebutuhan	Satuan
*	Makanan dan Minuman			
1.	Beras	Sedang	10	Kilogram
2.	Sumber Protein:			
	A. Daging	Sedang	0,75	Kilogram
	B. Ikan Segar	Baik	1,2	Kilogram
	C. Telur Ayam	Ras	1	Kilogram
3.	Kacang-kacangan: Tempe/Tahu	Baik	4,5	Kilogram
4.	Susu Bubuk	Sedang	1	Kilogram
5.	Gula Pasir	Sedang	1,2	Kilogram
6.	Minyak Goreng	Curah	1,2	Kilogram

No.	Komponen dan Jenis	Kualitas atau Kriteria	Jumlah Kebutuhan	Satuan
7.	Sayuran	Baik	7,5	Kilogram
8.	Buah-buahan (Setara Pisang/Pepaya)	Baik	4,5	Kilogram
9.	Karbohidrat Lain(Terigu)	Sedang	3	Kilogram
10.	Teh	Celup	1	Dus Isi 25
11.	Kopi	Sachet	4	75 Gram
12.	Air Minum Galon	Curah/Refil	3	Galon 19 Liter
13.	Bumbu	Nilai 1 Sampai Dengan 10	15	%

Sumber: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak

Berdasarkan tabel di atas, kebutuhan akan pangan merupakan salah satu kebutuhan terpenting dan utama bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia. Pemenuhan kebutuhan pangan tersebut dipengaruhi oleh faktor pendapatan. Pendapatan seorang wanita yang bekerja sebagai pedagang di Pasar Baru Trade Center dialokasikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

2.8.2. Kebutuhan Sandang

Kebutuhan sandang merupakan kebutuhan dasar kedua yang penting bagi manusia. Kebutuhan ini antara lain seperti baju dan celana (pakaian). Pakaian tersebut berfungsi untuk melindungi tubuh dari panas, dingin, hujan dan sinar matahari. Fungsi utama pakaian memang untuk melindungi tubuh namun, selain sebagai pelindung tubuh, pakaian juga dapat berfungsi sebagai penunjang

penampilan. Dengan pakaian, manusia akan memiliki kepercayaan diri saat berhadapan dengan orang lain. Di bawah ini adalah komponen pemenuhan untuk kebutuhan sandang (pakaian) antara lain yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 2

Komponen dan Jenis Kebutuhan Hidup Layak pada Sandang Hasil Peninjauan Tahun 2020

No.	Komponen dan Jenis	Kualitas atau Kriteria	Jumlah Kebutuhan	Satuan
*	Sandang			
1.	Celana dan Pakaian	Katun, Sedang	4,5/12	Potong
3.	Kemeja Lengan Pendek	Katun	4,5/12	Potong
4.	Kaos Oblong	Polister	4,5/12	Potong
5.	Sarung/Kain Panjang	Sedang	2/12	Potong
6.	Sepatu	Kulit Sintetis	2/12	Pasang
7.	Kaos Kaki	Polos	4/12	Pasang
8.	Sandal Jepit	Karet	2/12	Pasang
9.	Handuk Mandi	100 x 60 cm	1/12	Potong
10.	Perlengkapan Ibadah:			
	1. Sajadah	Sedang	1/12	Potong
	2. Al-Quran/Kitab Suci	Sedang	1/24	Buku
	3. Mukena/Peci	Sedang	1/12	Set/Potong

Sumber: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan sandang merupakan kebutuhan dasar yang mempunyai fungsi yang sangat penting bagi manusia karena sandang dapat melindungi tubuh dari segala macam cuaca dan dampak lainnya. Tingkat kebutuhan sandang setiap individu dan keluarga berbeda-beda tergantung pada kebutuhan, selera, keinginan dan penghasilan yang diperoleh guna dapat memenuhi kebutuhan sandang tersebut.

2.8.3. Kebutuhan Papan

Kebutuhan dasar selain pangan dan sandang adalah rumah. Rumah merupakan basis dan landasan bagi perkembangan ekonomi itu sendiri, karena setiap manusia pasti membutuhkan sebuah rumah. Memiliki rumah berarti aspirasi manusia untuk mendapatkan tempat tinggal yang aman dan nyaman dapat dipenuhi. Tidak hanya sebagai tempat tinggal, rumah berfungsi terlebih sebagai basis dari kehidupan manusia itu sendiri (Prayitno, 2012, bk. 18).

Sebagai kebutuhan dasar yang tercakup sebagai salah satu prasyarat minimal untuk dapat hidup dengan layak dan bermartabat, rumah dibutuhkan oleh semua keluarga. Meski demikian, pengadaan dan pemenuhan kebutuhan perumahan bukanlah sesuatu yang sederhana sehingga dapat dikerjakan dengan pola kerja *business as usual*.

Apabila suatu keluarga telah memiliki rumah, keluarga tersebut mendapatkan jaminan keamanan dan kepastian dalam melakukan kegiatan sehari-harinya, termasuk kegiatan ekonomi. Dengan memiliki rumah, setiap anggota keluarga akan yakin bahwa usaha ekonominya tidak akan berakhir dengan sia-sia karena diterpa goncangan atau kebutuhan mendadak. Melalui perannya sebagai

penjamin keamanan bagi kegiatan ekonomi tersebut, rumah sesungguhnya dapat dipandang sebagai unit dasar dari dunia ekonomi. Tidak hanya memberikan faktor keamanan psikologis bagi keluarga, rumah juga mampu memberikan manfaat ekonomi dalam cara yang lebih langsung dan objektif. Rumah yang terletak di daerah strategis misalnya, akan meningkatkan peluang bagi penghuninya untuk mengakses lapangan pekerjaan karena terletak di dekat rumahnya. Selain itu, juga akan mendekatkan penghuni rumah kepada sumber-sumber ekonomi primer yang vital, misalnya pangan (Prayitno, 2012, bk. 58). Komponen kebutuhan papan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 3

Komponen dan Jenis Kebutuhan Hidup Layak pada Papan Hasil Peninjauan Tahun 2020

No.	Komponen dan Jenis	Kualitas atau Kriteria	Jumlah Kebutuhan	Satuan
1.	Sewa Kamar	16 m ²	1	Bulan
2.	Dipan/Tempat Tidur	Nomor 3, Polos	1/48	Buah
3.	Perlengkapan Tidur:			
	A. Kasur Busa	Busa	1/48	Buah
	B. Bantal Busa	Busa	2/36	Buah
4.	Sprei dan Sarung Bantal	Katun, Sedang	2/12	Set
5.	Meja dan Kursi	1, 4	1/48	Set
6.	Lemari Pakaian	Kayu, Sedang	1/48	Buah
7.	Sapu	Ijuk, Sedang	2/12	Buah
8.	Perlengkapan Makan:			
	A. Piring dan Gelas	Polos	3/12	Buah
	B. Sendok Dan Garpu	Sedang	3/12	Buah

No.	Komponen dan Jenis	Kualitas atau Kriteria	Jumlah Kebutuhan	Satuan
9.	Perlengkapan Masak:			
	A. Ceret Alumunium	1,5 Liter, Sedang	1/24	Buah
	C. Panci Alumunium	Ukuran 24 cm, Sedang	1/24	Buah
	D. Sendok Masak	Alumunium	1/12	Buah
10.	<i>Rice Cooker</i>	SNI, Sedang	1/48	Buah
11.	Kompor dan Perlengkapannya:			
	A. Kompor Gas 1 Tungku	SNI, Sedang	1/24	Buah
	B. Selang dan Regulator	SNI, Sedang	1/24	Buah
	C. Tabung Gas 3 Kg	SNI, Sedang	1/60	Buah
	D. Gas Elpiji	Tabung Melon 3 Kg	2	Tabung
12.	Ember Plastik	Isi 20 Liter	2/12	Buah
13.	Gayung Plastik	Sedang	1/12	Buah
14.	Listrik	900 Watt	1	Bulan
15.	Bola Lampu	14 Watt	3/12	Buah
16.	Air Bersih	Standar PAM	3,5	Meter Kubik
17.	Sabun Cuci Pakaian	Bubuk Detergen	1,5	Kg
18.	Sabun Cuci Piring	Refil	1	800 Mililiter
19.	Setrika	SNI	1/48	Buah
20.	Rak Piring	Plastik	1/24	Buah
21.	Pisau Dapur	Stainless	1/36	Buah
22.	Cermin	30 X 50 cm	1/36	Buah
23.	Televisi	LED 21 inci	1/60	Buah

Sumber: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak

Kebutuhan manusia terhadap papan atau tempat tinggal berkaitan dengan pemenuhan perlengkapan yang dibutuhkan dalam suatu rumah tangga. Salah satu upaya yang dilakukan wanita dalam memenuhi kebutuhan papan ini adalah mereka bekerja sebagai pedagang. Penghasilan yang didapatkan selama ia bekerja, salah satunya digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga tersebut.

2.8.4. Kebutuhan Pendidikan

Pendidikan mempunyai peran yang penting dalam membentuk dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan juga mempengaruhi secara penuh dalam proses pembangunan, pertumbuhan dan kualitas suatu bangsa. Semakin baik kualitas pendidikan pada suatu negara, maka negara tersebut akan memiliki kemajuan diberbagai bidang kehidupan. Hal ini bukan saja karena pendidikan akan berpengaruh terhadap produktifitas, tetapi juga akan berpengaruh terhadap fertilitas masyarakat. Pendidikan menjadikan sumber daya manusia lebih siap menghadapi perubahan dalam lingkungan kerja karena pendidikan tersebut diarahkan untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat.

Oleh karena itu, pendidikan akan berdampak langsung terhadap suatu negara yang mana apabila negara yang memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat (Yusuf, 2014).

Pemenuhan kebutuhan pendidikan yang diperlukan keluarga pedagang antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4

**Komponen dan Jenis Kebutuhan Hidup Layak pada Pendidikan Hasil
Peninjauan Tahun 2020**

No.	Komponen dan Jenis	Kualitas atau Kriteria	Jumlah Kebutuhan	Satuan
1.	Alat tulis (buku tulis, <i>ballpoint</i> atau pensil)	Refil	6/12	Buah
2.	Iuran Sekolah (SPP)	Uang Tunai	2/12	Rp
3.	Uang saku sekolah	Uang Tunai	2/12	Rp
4.	Buku Paket	Buku	6/12	Buah

Sumber: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak

Menurut Yusuf (2014) menganalisis kebutuhan pendidikan tentu tidak luput dari komponen-komponen pendidikan, yang antara lain mencakup tentang:

1. Biaya pendidikan
2. Kualitas pendidikan
3. Kompendium pendidikan
4. Fasilitas pembelajaran.

Biaya pendidikan yang tinggi menyebabkan sebagian masyarakat tidak mampu membayarnya, sehingga untuk dapat memenuhi kebutuhan pendidikan tersebut maka para wanita bekerja dan penghasilannya pun dialokasikan untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya.

2.8.5. Kebutuhan Kesehatan

Kesehatan merupakan kebutuhan yang sangat penting yang harus dipenuhi oleh setiap individu maupun keluarga. Dengan kondisi yang sehat, individu tersebut dapat menjalankan perannya dengan baik, melakukan semua aktivitasnya dan bekerja dengan baik agar dapat memenuhi kebutuhannya dan

keluarganya sendiri. Untuk menjaga kesehatannya, seseorang harus membiasakan diri untuk menjaga pribadinya dan lingkungannya.

Kebutuhan kesehatan dalam rangka meningkatkan status kesehatan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pelayanan kesehatan dalam pengertian bahwa masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat didiagnosa dan diobati secara cepat dan tepat (Massie, 2013). Ada beberapa komponen-komponen kebutuhan kesehatan yang harus terpenuhi dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 5

Komponen dan Jenis Kebutuhan Hidup Layak pada Kesehatan Hasil Peninjauan Tahun 2020

No.	Komponen dan Jenis	Kualitas Atau Kriteria	Jumlah Kebutuhan	Satuan
*	Sarana Kesehatan:			
1.	A. Pasta Gigi	80 Gram	1	Tube
	B. Sabun Mandi	80 Gram	2	Buah
	C. Sikat Gigi	Produk Lokal	6/12	Buah
	D. Shampo	Produk Lokal	1	Botol
	E. Korek Kuping	Produk Lokal	4/12	Box Isi 50
	F. Alat Cukur	Produl Lokal	1	Buah
2.	<i>Deodorant</i>	100 M/Gram	6/12	Buah
3.	Obat Anti Nyamuk	Cair, Semprot	1	Kaleng
4.	Potong Rambut	Non Salon	6/12	Kali
5.	Sisir	Plastik	2/12	Buah

Sumber: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak

Dalam setiap keluarga upaya untuk memenuhi kebutuhan kesehatan ini berbeda-beda, misalnya dalam cara pengobatannya, keluarga yang mampu akan mengeluarkan cukup banyak uang untuk mendapatkan pengobatan yang terbaik bagi mereka, sedangkan untuk keluarga yang kurang mampu, meskipun mereka

menginginkan yang terbaik pula tetapi mereka tidak memiliki cukup uang, sehingga mereka hanya melakukan pengobatan semampunya dan seadanya saja. Para wanita yang bekerja sebagai pedagang di Pasar Baru Trade Center Kota Bandung ini, mereka mengalokasikan sebagian penghasilannya untuk pengeluaran kebutuhan kesehatan setiap anggota keluarga.